

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI

Pande Made Visera Abimanyu¹
Ida Ayu Nyoman Saskara²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

¹email: abipande98@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (3) menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah pengamatan 45 titik pengamatan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (2) jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali (3) pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (4) lama tinggal wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, (5) pengeluaran pemerintah berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Daerah, Penduduk, Pengeluaran Pemerintah, Lama Tinggal Wisatawan*

ABSTRACT

The objectives of this study are (1) to analyze the effect of population, government expenditure, and length of stay of tourists simultaneously on local revenue in the Regency / City of Bali Province, (2) to partially analyze the effect of population size, government expenditure, and length of stay of tourists. to the local revenue in the Regency / City of Bali Province, (3) to analyze the variables that have the most dominant influence on the local revenue in the regencies / cities of Bali Province. The data used are secondary data, with 45 observation points. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that (1) total population, government expenditure, and length of stay of tourists simultaneously had a significant effect on local revenue in the Regency / City of Bali Province (2) the population had a negative and insignificant effect on local revenue in the Regency / City Province. Bali (3) partially government spending has a positive and significant effect on local revenue in the Regency / City of Bali Province, (4) the length of stay of tourists partially has a positive and significant effect on local revenue in the Regency / City of Bali Province, (5) expenditure the government has the most dominant influence on local revenue in the Regency / City of Bali Province

Keywords: Local Revenue, Population, Government Expenditure, Length of Stay of Tourists

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi atas kabupaten/kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Otonomi Daerah yang secara resmi telah diberlakukan di Indonesia menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber-sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menserasikan laju pertumbuhan antar daerah di Indonesia.

Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka

daerah dipacu untuk dapat mencari sumber pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Menurut Uppun (2016) Otonomi daerah adalah sistem yang memberi keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merencanakan, menentukan prioritas dan melaksanakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan kemampuan daerahnya. Kebijakan otonomi daerah itu dimaksudkan untuk semakin mendekatkan pemerintahan kepada masyarakatnya agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (Suartha, 2016).

Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan jalan desentralisasi fiskal atau pendelegasian wewenang oleh pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangga pemerintahan daerahnya sendiri atau sering disebut dengan otonomi daerah (otda) (Oates, 1972). Desentralisasi fiskal di Negara Indonesia berusaha untuk mempromosikan pemerataan dengan mengatasi ketidakseimbangan vertikal dan horizontal dan dengan memberikan pemerintah pusat dan kabupaten-kabupaten dengan insentif untuk pengembangan pembangunan (Irawan, 2015).

Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kreatifitas pemerintah daerah masing-masing, karena memperoleh kebebasan dalam memungut retribusi. Kebebasan ini dalam artian bahwa karena lapangan retribusi daerah berhubungan dengan pengganti jasa/fasilitas yang diberikan oleh daerah, maka pemungutan retribusi dapat dilakukan beberapa kali sepanjang wajib retribusi masih memanfaatkan jasa yang disediakan. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pengertian retribusi

daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pemanfaatan modal sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi (Chatterjee, 2005). Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Selain retribusi daerah, infrastruktur fisik seperti transportasi dan infrastruktur telekomunikasi yang sebagai modal-modal sosial masyarakat merupakan infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi (Bratamanggala, 2017). Menurut Herranz (2007) investasi infrastruktur memiliki peran yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain investasi infrastruktur, seperti yang dijelaskan Lin dan Liu (2000) bahwa pemerintah juga perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal utama yang selalu diusahakan oleh pemerintah di negara berkembang (Kaur dan Singh, 2016). Pertumbuhan ekonomi diawali dengan meningkatnya output barang dan jasa (Seran, 2017). Retribusi daerah adalah salah satu penerimaan yang mendasari Pendapatan Asli Daerah pada suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (Taufik, 2014).

Menurut Sinclair (1998) bahwa pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita dan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk mempromosikan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan efek pendapatan, yaitu meningkatkan pendapatan, menciptakan

peluang kerja, dan menghasilkan efek pengganda yang dihasilkan dari peningkatan pendapatan (Permadi, 2018). Pendapatan yang memicu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari sektor pajak maupun retribusi daerah. Menurut Ghosh (2008) Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan cara meningkatkan pendapatan nasional lebih cepat daripada utang publik. Untuk memicu pertumbuhan ekonomi maka pemerintah negara-negara berkembang harus fokus pada kebijakan ekonomi (Ekanayake, 2012).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil badan usaha milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pajak yaitu pajak properti yang menghasilkan pendapatan yang stabil terlepas dari pergerakan harga di pasar *real estate* (Ihlanfeldt dan Willardsen, 2014). Besar kecilnya penerimaan retribusi daerah sangat bergantung kepada besar kecilnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pungutan retribusi daerah. Kresnandra (2013), strategi pengalokasian anggaran yang tepat adalah dengan mengoptimalkan potensi sektor-sektor pembangunan melalui pengalokasian hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah yang nantinya akan dapat menurunkan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Setiap tahun didalam anggaran pemerintahan daerah, ditetapkan target penerimaan retribusi daerah yang harus dicapai.

Retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengevaluasi hasil pembangunan (Fajrii, dkk. 2016). Selain

untuk mengevaluasi hasil pembangunan, menurut (Rimbawan, 2012) pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan nasional ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi akan menciptakan *multiplier effect* terhadap sendi-sendi kehidupan seperti lingkungan ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Suartha, dkk.2017). Menurut Gurluk (2009) pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dengan pembangunan manusia, yaitu pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber daya untuk memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam pembangunan manusia.

Santosa (2013) mengatakan, bahwa peningkatan retribusi daerah yang dianggap sebagai modal secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan efek positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Menurut Umberger (2015) pasar memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan retribusi daerah. Retribusi daerah di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Bali berasal dari; (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu (BPS Provinsi Bali, 2013).

Perkembangan pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh sumber pendapatan daerah terutama untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu diperlukan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatur perekonomian daerahnya untuk

membiyai seluruh kebutuhan dana pembangunan yang diperlukan. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah adanya kendala dalam menghimpun dana yang berasal dari daerah itu sendiri, sehingga pembangunan daerah cenderung tergantung pada sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Menyadari bahwa ketergantungan tersebut kurang baik bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan daerah, maka diharapkan pemerintah daerah menggali semua sumber ekonomi yang dimiliki daerah masing-masing guna membiayai pelaksanaan daerah itu sendiri.

Hal ini didukung dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dimana dalam undang-undang tersebut pemerintah daerah dan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya berdasarkan aspirasi pemerintah daerah dan diberikan kewenangan untuk menggali dan memanfaatkan sumber keuangan daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi di ukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap bantuan APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Tabel 1. Penerimaan PAD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014-2018 (milyar rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Penerimaan PAD Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (milyar rupiah)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jembrana	89,35	98,03	114,53	121,34	126,48
2	Tabanan	273,45	300,80	318,08	426,64	363,37
3	Badung	2722,63	3001,46	3563,46	4172,46	4555,72
4	Gianyar	424,48	45,72	529,86	662,75	770,20
5	Klungkung	98,84	120,04	134,14	153,21	186,97
6	Bangli	76,14	87,73	104,83	104,59	122,69
7	Karangasem	239,43	243,13	318,08	198,58	200,36
8	Buleleng	219,68	293,04	282,11	455,20	335,56
9	Denpasar	698,74	776,21	807,05	1008,71	940,11
Provinsi Bali		2920,42	3041,27	3041,20	3398,47	3718,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan PAD di Provinsi Bali tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meningkat setiap tahunnya, namun PAD dari kabupaten/kota berfluktuasi setiap tahunnya. Salah satu kabupaten/kota yang penerimaan PADnya berfluktuasi yaitu Kabupaten Tabanan yang menurun di tahun 2018, Kabupaten Bangli mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng penerimaan PADnya berfluktuasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan Kota Denpasar penerimaan PAD menurun di tahun 2018.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan pada ketentuan dalam UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 34 tahun 2004. Dengan otonomi, diharapkan adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah guna memperdayakan masyarakat, meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun perekonomian wilayahnya tergantung pada kemampuan untuk memobilisasi potensi yang ada pada masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerah, karena semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi kualitas otonominya yang mengindikasinya semakin mandiri bidang keuangan daerahnya.

PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah. Berkaitan dengan konsep PAD, menurut studi Bank Dunia menyatakan pemerintah dapat melaksanakan fungsinya secara efektif apabila diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan pengeluaran sektor publik yang harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik dari PAD, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman maupun subsidi, dan bantuan pemerintah pusat (Rondinelli, 2007:181).

Tujuan di dalam membangun pada dasarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu pembangunan haruslah dipandang sebagai rangkaian proses terjadinya pertumbuhan yang berjalan secara kesinambungan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Menurut Bhaskara Perwira Jaya dan Widanta (2014), pembangunan daerah yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, mandiri dan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah lain yang lebih maju dan sekaligus secara agregat meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara secara adil dan merata. Pemberian otonomi kepada daerah akan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan peran nyata dan kemandirian daerah dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Bhaskara Perwira Jaya dan Widanta, 2014). Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 4 komponen yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk (*in-migration*), dan migrasi keluar (*out-migration*). Selisih antara kelahiran dan kematian tersebut (*reproductive change*) perubahan reproduktif atau (*natural increase gration*) disebut imigrasi neto (Lembaga Demografi FE UI, 2000:5)

Menurut Sitaniapessy (2013), pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk

membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah itu. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu perekonomian.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mempengaruhi kondisi keuangan daerah, apabila penerapan tujuan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan anggaran pendapatan daerah yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata.

Salah satu sektor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu dari sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu industri yang padat karya. Pengembangan industri ini juga menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan daerah, selain itu sektor pariwisata dapat merangsang investasi infrastruktur baru

untuk menunjang keberlangsungan pariwisata dalam suatu daerah. Perkembangan pariwisata berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, salah satu di antaranya adalah dampak pariwisata terhadap pendapatan pemerintah (Novi dan Retno, 2014). Sektor pariwisata merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk memperbesar pendapatan asli daerah, oleh karena itu program pengembangan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Peranan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dapat menambah lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Menurut Widiana dan Sudiana (2015), industri pariwisata di Bali akan menggerakkan sektor-sektor yang terkait, dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Bali sebagai surganya pariwisata memberi dampak bagi pertumbuhan pariwisata.

Lama tinggal wisatawan merupakan jumlah malam atau hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan mancanegara di luar negara tempat tinggalnya. Mengenai lama tinggal wisatawan mancanegara di kabupaten/kota di Provinsi Bali sangat bervariasi, faktor lama tinggal wisatawan memang merupakan salah satu faktor yang menentukan besar atau kecilnya pendapatan atau devisa yang diterima untuk negara-negara yang mengandalkan devisa dari industri pariwisata. Secara teoritis, semakin lama seorang wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, semakin banyak uang yang dibelanjakan di daerah tersebut. Paling sedikit untuk keperluan makan dan minum serta akomodasi hotel selama tinggal disana (Wijaya, 2011).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai (1) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, (2) menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara parsial terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, dan (3) menganalisis variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, metode ini digunakan karena data yang terwujud merupakan data dalam bentuk angka. Selain itu pengolahan data dilakukan menggunakan analisis statistik, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2007:33) penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berbentuk angka, data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah. Metode penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Lokasi penelitian ini terdapat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang mencakup sembilan kabupaten/kota yaitu, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng Dan Kota

Denpasar. Pemilihan lokasi penelitian pada kabupaten/kota di Provinsi Bali karena mengacu pada Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan PAD pada kabupaten/kota di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya dari tahun 2014-2018, sedangkan jika dilihat dari penerimaan PAD Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun penerimaan PAD kabupaten/kota berfluktuasi dan cenderung menurun. Data yang digunakan mencakup data regional yang berada di kabupaten/kota Provinsi Bali secara tahunan yang diambil dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Obyek penelitian dalam penelitian ini yaitu, jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam penelitian ini data kuantitatif diperoleh melalui keterangan mengenai data-data yang terkait dengan data jumlah penduduk, data pengeluaran pemerintah, data lama tinggal wisatawan, dan data pendapatan asli daerah menurut kabupaten/kota Provinsi Bali pada tahun 2014 sampai dengan 2018. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dan konsep mengenai jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan, dan pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu : Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Klungkung, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangli, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem, Badan

Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, dan Badan Pusat Statistik Kota Denpasar berupa data jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan, dan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2014 sampai dengan 2018. Metode wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber data jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, lama tinggal wisatawan dan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Jumlah pengamatan dalam penelitian ini ada di Sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2014 hingga 2018 (5 tahun), maka besarnya ukuran sampel adalah $9 \times 5 = 45$ pengamatan dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu: jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan terhadap variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji f dan uji t maka terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Pengujian yang dilakukan adalah dengan uji Normalitas, Multikolinearitas, dan Heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji residualnya, apakah dalam sebuah regresi residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila residualnya berdistribusi normal (Santoso, 1999;98). Pengujian Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu dengan analisis grafik dan dengan analisis statistik (Ghozali, 2016;107), namun analisis statistik yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis uji normalitas ditunjukkan oleh Tabel 2 berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	351.01996934
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.052
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.6 di atas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp sig 2-tailed* uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-smirnov, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Salah satu asumsi dalam metode kuadrat terkecil adalah tidak adanya hubungan linear antara variabel-variabel bebas. Jika hal ini terjadi, maka dikatakan bahwa data mengalami multikolinearitas. Indikasi awal data yang mengalami multikolinearitas yaitu apabila model memiliki *standard error* yang besar dan nilai

statistic t yang rendah. Ada beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dalam suatu model regresi. Cara yang digunakan untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen atau *VIF* kurang dari 10, maka dikatakan tidak ada multikolinearitas. Hasil analisis uji multikolinearitas ditunjukkan oleh Tabel 3 berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Jumlah Penduduk	.749	1.335
Pengeluaran Pemerintah	.639	1.565
Lama Tinggal Wisatawan	.768	1.302

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.7, menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel independen lebih besar dari 0.10 dengan nilai *Tolerance* masing-masing variabel independen bernilai jumlah penduduk sebesar 0.749, pengeluaran pemerintah sebesar 0.639, dan lama tinggal wisatawan sebesar 0.768. Hasil analisis nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal serupa yaitu memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dengan nilai VIF masing-masing variabel independen bernilai jumlah penduduk sebesar 1.335, pengeluaran pemerintah sebesar 1.565, dan lama tinggal wisatawan sebesar 1.302. Berdasarkan nilai *Tolerance* dan VIF dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika varians berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak mengandung gejala heteroskedastisitas atau mempunyai varians yang homogen. Banyak metode untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastis, tetapi dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser.

Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	82.494	78.176		1.055	.298
Jumlah Penduduk	-.048	.137	-.050	-.349	.729
Pengeluaran Pemerintah	.111	.027	.633	4.118	.690
Lama Tinggal Wisatawan	3.853	31.489	.017	.122	.903

a. Dependent Variable: ABSRES1

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel jumlah penduduk (X_1), pengeluaran pemerintah (X_2), dan lama tinggal wisatawan (X_3) memiliki nilai signifikansi masing-masing yaitu 0.729, 0.690, dan 0.903 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji F ditunjukkan oleh Tabel 5 berikut:

Tabel 5 Uji Simultan atau Uji F

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	47064638.824	3	15688212.941	118.643	.000 ^b
	Residual	5421460.830	41	132230.752		
	Total	52486099.654	44			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan Tabel 5 secara simultan variabel jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli dilihat dari nilai F hitung sebesar 118,643 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,84, serta dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0,05. Ini berarti bahwa variabel jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan berpengaruh secara serempak terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel 6 Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.947 ^a	.897	.889	363.63547

a. Predictors: (Constant), Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil olahan data menggunakan SPSS, terlihat bahwa koefisien determinasi atau $R^2 = 0,897$ memiliki arti bahwa 89,7 persen variasi dari pendapatan asli daerah mampu dijelaskan oleh variasi jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan, sedangkan 10,3 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Tabel 7 Uji Parsial atau Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1052.001	163.622		-6.429	.000
Jumlah Penduduk	-.220	.286	-.045	-.771	.445
Pengeluaran Pemerintah	.808	.056	.899	14.314	.000
Lama Tinggal Wisatawan	151.843	65.906	.132	2.304	.026

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Data sekunder, 2020

Adapun persamaannya secara matematis sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it}$$

$$\hat{Y}_{it} = -1052,001 - 0,220 X_{1it} + 0,808 X_{2it} + 151,843 X_{3it}$$

$$\text{Sig} = \quad \quad \quad 0,445 \quad \quad 0,000 \quad \quad 0,026$$

1) Pengaruh jumlah penduduk terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7 menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali yang ditunjukkan dengan nilai koefisien negatif yaitu - 0,220 dan tingkat signifikan 0,445. Hal ini menunjukkan hubungan negatif antara variabel jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah, artinya apabila variabel jumlah penduduk bertambah seribu orang dan variabel lain dianggap konstan, maka mengakibatkan pendapatan asli daerah akan turun sebesar 0,220 milyar rupiah. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang konsumsi. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian Bhaskara Perwira Jaya dengan Widanta (2014) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Denpasar. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wibowo (2016) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menolak penelitian Aryanti dan Indarti (2010) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang. Serta menolak penelitian Triani dan Kuntari (2010) yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Karanganyar.

2) Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 7 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,808 dengan signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2014) yang mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pengeluaran Pemerintah seperti yang tertuang dalam belanja APBD merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Sebagai bagian dari kebijakan publik, maka sudah semestinya jika pengeluaran pemerintah digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti variabel pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli daerah.

Hasil penelitian ini diperkuat kembali dengan landasan teori yang dijelaskan oleh Wagner mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam pendapatan perkapita meningkat, secara relatif meningkatkan pengeluaran. Didukung dengan teori dari Peacock dan Wiseman juga bahwa pemerintah memiliki peran sebagai katalisator dan fasilitator sehingga membutuhkan anggaran belanja untuk melaksanakan pembangunan. Pengeluaran tersebut digunakan untuk administrasi pembangunan dan sebagian lain untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastruktur yang penting. Sehingga pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi kegiatan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hubungan pengeluaran pemerintah dengan pendapatan asli daerah sangat jelas, apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dan pelayanan publik dengan cara melakukan pembangunan hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah tersebut. Meningkatkan kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan

retribusi sehingga memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

3) Pengaruh lama tinggal wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa lama tinggal wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Artinya semakin lama wisatawan tinggal di kabupaten/kota Provinsi Bali, maka semakin besar pula PAD yang diterima oleh kabupaten/kota Provinsi Bali. Hal tersebut dapat dilihat nilai koefisien sebesar 151,843 pada tingkat signifikansi sebesar 0,026 yang lebih kecil dari 0,005. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aneldus dan Heny Urmila Dewi (2020) yang menyatakan bahwa lama tinggal wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD.

Lama tinggal wisatawan di kabupaten/kota Provinsi Bali berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Wisatawan yang datang dan berkunjung di Provinsi Bali mengeluarkan biaya untuk keperluan sehari-hari dalam melakukan aktivitas pariwisata. Lama tinggal wisatawan di Provinsi Bali setiap tahun berfluktuasi yang rata-rata lama tinggal wisatawan lebih dari 2 hari sehingga pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Wijaya (2011), yang hasilnya bahwa lama tinggal wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Skufic dan Stokovic (2011) yang menyatakan bahwa semakin lama wisatawan tinggal di suatu

daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah (Adyaharjanti, 2020).

4) Variabel Dominan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan variabel yang berpengaruh dominan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali yaitu pengeluaran pemerintah, karena dilihat dari *standardized koefisien beta* memiliki nilai yang paling yaitu dilihat 0,899.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

- 1) Jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan lama tinggal wisatawan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 2) Jumlah penduduk secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan lama tinggal wisatawan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali.
- 3) Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten/kota Provinsi Bali yaitu pengeluaran pemerintah.

SARAN

- 1) Jumlah penduduk berdasarkan hasil penelitian memiliki pengaruh yang negatif terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk serta mengoptimalkan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia dalam hal ini penduduk, baik dari segi pendidikan, kesehatan serta dukungan fasilitas lainnya, guna meningkatkan produktivitasnya. Bertambahnya kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan produktivitas penduduk yang secara otomatis meningkatkan pendapatan, dan pendapatan asli daerah.
- 2) Pengeluaran pemerintah dalam hal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Pemerintah sebaiknya memaksimalkan pengeluaran pemerintah digunakan untuk kepentingan publik agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk penyediaan barang publik dan pelayanan publik dengan cara melakukan pembangunan hal ini dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah yang akan meningkatkan penerimaan PAD.
- 3) Lama tinggal wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, hendaknya pemerintah tetap memperhatikan masalah pariwisata. Pemerintah bisa meningkatkan kualitas pariwisata melalui promosi-promosi maupun memperbaharui atau memperbaiki fasilitas yang sudah ada, jadi wisatawan

yang datang akan nyaman berada di tempat wisata tersebut dan dapat mempengaruhi keinginan wisatawan untuk berwisata lebih lama. Selain itu dalam masalah keamanan seharusnya pemerintah terus meningkatkan keamanan di tempat wisata.

REFERENSI

- Aryanti, Eni dan Iin Indarti. 2010. Pengaruh Variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Periode 2000-2009 di Kota Semarang. *ASET Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol.28 No.2. pp: 133-151
- Asmuruf, F dkk. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15, Nomor 05
- Bhaskara Perwira Jaya, Gede dan AA Bagus Putu Widanta. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*. Vol 3 No 5 : 201-208
- Bratamanggala, Rudi. 2017. Implications of Tax Receivables and Retribution for the Economic Growth of Indonesia. *European Research Studies Journal*. Volume 22, No 3. pp: 1467-1498
- Chatterjee, Santanu. 2005. Capital Utilization, Economic Growth and Convergence. *Journal of Economic Dynamics & Control*. Vol. 29 No 12. pp 2093- 2124.
- Ekanayake. E.M and Long Aubrey E. 2012. Tourism Development and Economic Growth In Developing Countries. *The International Journal of Business and Finance Research*. Volume 6, Number 1. Pp. 356-387
- Fajrii, Muhammad dan Arman Delis. Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatra. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 5 No 3. Pp 186-198
- Ghosh, Partha Pratim, Arpita Dhar and Debesh Chakraborty. 2008. Government Finances and Economic Growth: A Policy Perspective on the Developing Economy of Sri Lanka. *Asia-Pacific Development Journal*, Vol. 15, No. 2. Pp. 765-793
- Gurluk, Serkan. 2009. Economic Growth, Industrial Pollution and Human Development in the Mediterranean Region. *Ecological Economics*. Vol 6

No 8. pp 2327-2335.

Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tatham, and W. C. Black. (1995). *Multivariate Data Analysis with Readings* (Fourth Edition). *New Jersey, USA : Prentice-Hall International, Inc.* Vol 3 No 1 pp. 27-54

Hendriyani, Novianti. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus pada DPPKAD, BAPPEDA, dan BPS Kabupaten Boyolali tahun 2006-2015). *E-jurnal Ekonomi Bisnis.* Vol 5 No 2 . pp 1-10

Herranz, Alfonso-Loncan. 2007. Infrastructure Investment and Spanish Economic Growth, 1850-1935. *Exploration In Economic History.* Vol. 44, No 16. pp 452- 468.

Hertanto, Indrajati dan Sriyana, Jaka. (2011). Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.* Volume 12 Nomor 01

Ihlanfeldt, K. R. & Willardsen, K., 2014. The millage rate offset and property tax revenue stability. *Regional Science and Urban Economics, May,* Volume 46, pp. 167-176

Irawan, Andi. 2015 Regional Income Disparities in Indonesia: Measurements, Convergence Process, and Decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies.* Vol 51 No 1 pp. 148-149.

Juliansyah, Hijri & Sulkadria. 2018. Pengaruh Total Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal.* Volume 01 Nomor 02. Pp 58-64.

Kaur, Manjinder dan Lakhwinder Singh. 2016. Knowledge In The Economic Growth Of Developing Economies. *African Journal of Development.* Vol 8 No 2. pp: 358-387

Kresnandra, A.A. Ngurah Agung dan Ni Made Adi Erawati. 2013. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Pengangguran Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 5. No 3 pp: 544-560

Kumalawati. Esi. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Periode 2000-2014. *E-Jurnal Universitas Muhammadiyah.* Vol 3 No 7. hal. 22-23

- Kurniawan, Robi & Shunsuke Managi. 2018. Economic Growth and Sustainable Development in Indonesia: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 54, No. 3, pp: 339–361
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. No 12. pp: 1 – 21.
- Oates, W.E. 1972. Fiscal Decentralization and Economic Development. *National Tax Journal* Vol. 4 No. 6 pp. 25-47
- Permadi, Yudistira Andi. 2018. Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol. 11 No. 2. Pp. 678-699
- Rimbawan, Nyoman Dayuh .2012. Pertumbuhan Ekonomi Dan Kegiatan Ekonomi Angkatan Kerja Di Provinsi Bali. *PIRAMIDA*. Vol 6. Nomor 2. Pp: 78-91
- Rondinelli, Dennis, A. (edit), 2007. *Public Administration and Democratic Governance: Government Serving Citizen*. USA: United Nation Publication
- Santosa, Budi. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Daerah terhadap Pertumbuhan, Pengangguran dan Kemiskinan 33 Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. Vol. 5, No. 2. Pp: 65-83
- Santosa, Purbayu & Retno Puji Rahayu. 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri. *Jurnal Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta. Vol 8 No 5. hal. 134-156
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 10 No. 1. Pp: 156-187
- Sinclair, M Thea. 1998. Tourism and economic development: Asurve. *The Journal of Development Studies* Vol 34 No 5, pp: 1079-1092
- Sitaniapessy, Harry A.P. 2013. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB dan PAD. *Jurnal Economica*. Vol.9, No.1, pp: 37-54
- Suartha, Nyoman dan I.Gst Wayan Murjana Yasa. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol 3. No 5. Pp: 76-91
- Suartha, Nyoman. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Laju

- Pertumbuhan Dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali.
Piramida. Vol. 12 No. 1 pp. 1 - 7
- Sutrisno. 2002. Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Semarang). *Tesis*. Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Undip. Semarang
- Taufik, Muhammad. 2014. Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7 No 2. Pp: 89-102
- Todaro, M.P. 2006. *Economic Development. Seventh Edition*, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Triani dan Kuntari, Yeni. 2010. Pengaruh variabel Makro Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di kabupaten Karanganyar. *ASET Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.12 No.1 p: 87-94
- Umberger, Wendy J. 2015. Market-Channel Choices of Indonesian Potato Farmers: A Best–Worst Scaling Experiment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 51, No. 3, pp: 461–77
- Uppun, Paulus. 2016. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pelayanan KB Dan Pengendalian Kelahiran Di Provinsi Sulawesi Selatan. *Piramida*. Vol. XII No. 2 pp. 59 - 71
- Wahyuni, A.T. 2017. Pengaruh PDRB, Tingkat Inflasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kota Bandar Lampung pada Tahun 2006-2015). Fakultas Ekonomi Islam IAIN Raden Intan Lampung. Hal 124-145
- Wibowo, S. 2016. Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Hotel, Pengeluaran Pemerintah dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013). *Jurnal Unisbank*